



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/115/Kept./403.013/2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, ADMIN INSTANSI / ORGANISASI, PEJABAT  
PENGHUBUNG, DAN ADMIN UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN  
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL-  
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, penyelenggara pelayanan publik mengintegrasikan dengan aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, agar pengelolaan pengaduan terlaksana secara efektif, efisien, akuntabel, dan terintegrasi, maka perlu dibentuk tim yang mengelola pengaduan pada aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat yang beranggotakan unsur perangkat daerah di Kabupaten Magetan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina, Admin Instansi/Organisasi, Pejabat Penghubung dan Admin Unit Penyelenggara Pelayanan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Tim Pembina, Admin Instansi/Organisasi, Pejabat Penghubung dan Admin Unit Penyelenggara Pelayanan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik;
- b. menjamin tersedianya anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap instansi;
- c. menjamin tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
- d. menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Magetan;
- e. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Magetan;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA

: Admin Instansi/Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengelolaan pengaduan publik di Pemerintah Daerah yang ditugaskan oleh Pembina/Penangguna Jawab untuk mengelola pengaduan pelayanan publik melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat;
- b. mengkoordinasikan pengelolaan pengaduan publik di Kabupaten Magetan;
- c. melakukan telaah dan verifikasi dengan meneruskan pengaduan publik kepada pengelola pengaduan pada organisasi penyelenggara/satuan kerja berdasarkan kategori pengaduan;
- d. meneruskan pengaduan kepada Admin Nasional apabila pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya;
- e. berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang terhubung dengan aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat untuk menindaklanjuti pengaduan yang terkait penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum oleh aparatur;
- f. melakukan pemantauan atas tindak lanjut penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Organisasi Penyelenggara;

- g. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan publik secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan publik;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya pada Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menindaklanjuti dan memantau penyelesaian pengaduan publik yang diterima dari Admin Instansi/Organisasi;
- b. mengkoordinasikan pengelolaan pengaduan publik pada tingkat satuan kerja masing-masing;
- c. memberikan telaah, verifikasi dan respon terhadap pengaduan yang diterima sesuai dengan jangka waktu penyelesaian;
- d. meneruskan pengaduan kepada Admin Instansi / Organisasi apabila pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya;
- e. berkoordinasi dengan Admin Unit Penyelenggara Pelayanan dan/atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam penyelesaian pengaduan apabila diperlukan;
- f. memberikan respon awal dan jawaban atas tindak lanjut penyelesaian pengaduan publik yang diterima;
- g. memberikan laporan atas tindak lanjut penyelesaian pengaduan publik kepada Admin Instansi / Organisasi.

KELIMA : Admin Unit Penyelenggaraan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. membantu Pejabat Penghubung dalam menindaklanjuti dan memantau penyelesaian pengaduan publik yang diterima dari Admin Instansi/Organisasi;
- b. membantu Pejabat Penghubung dalam mengkoordinasikan pengelolaan pengaduan publik pada tingkat satuan kerja masing-masing;
- c. membantu Pejabat Penghubung dalam memberikan telaah, verifikasi dan respon terhadap pengaduan yang diterima sesuai dengan jangka waktu penyelesaian;

- d. membantu Pejabat Penghubung dalam meneruskan pengaduan kepada Admin Instansi / Organisasi apabila pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya;
- e. membantu Pejabat Penghubung dalam berkoordinasi dengan Admin Unit Penyelenggara Pelayanan dan/atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam penyelesaian pengaduan apabila diperlukan;
- f. membantu Pejabat Penghubung dalam memberikan respon awal dan jawaban atas tindak lanjut penyelesaian pengaduan publik yang diterima;
- g. membantu Pejabat Penghubung dalam memberikan laporan atas tindak lanjut penyelesaian pengaduan publik kepada Admin Instansi / Organisasi.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran berjalan.

KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/155/Kept/403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Pengaduan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 16 April 2022

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/115/Kept./403.103/2022

TANGGAL :16 April 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINA  
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL –  
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Pembina	1. Bupati	
II	Penanggung Jawab	2. Wakil Bupati	
III	Pengawas	Sekretaris Daerah	
		1. Asisten Administrasi Umum	
		2. Inspektur pada Inspektorat	
		3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	
		4. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	
IV	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	
V	Sekretaris I	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Sekretaris II	Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Dwi Anita Mardalina, S.sos

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/115/Kept./403.103/2022

TANGGAL :16 April 2022

SUSUNAN ANGGOTA ADMIN INSTANSI/ORGANISASI, PEJABAT PENGHUBUNG  
DAN ADMIN UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN SISTEM PENGELOLAAN  
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL – LAYANAN ASPIRASI DAN  
PENGADUAN ONLINE RAKYAT

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Admin Instansi/ Organisasi		
	1. Koordinator	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Agus Suprianto, A.Md
	2. Admin Koordinator	Pranata Komputer Mahir pada Dinas Komunikasi dan Informatika	
II	Pejabat Penghubung		
	1. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah	
	2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	
	3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	
	4. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah	
	5. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah	
	6. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	
	7. Bagian Umum	Kepala Bagian Umum pada	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	Sekretariat Daerah 8. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah 9. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 10. Sekretariat DPRD 11. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 12. Dinas Kesehatan 13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 14. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 15. Dinas Sosial 16. Dinas Tenaga Kerja 17. Dinas Lingkungan Hidup 18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 20. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,	Sekretariat Daerah Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Sekretaris pada Sekretariat DPRD Sekretaris pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Sekretaris pada Dinas Kesehatan Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sekretaris pada Dinas Sosial Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sekretaris pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 21. Dinas Perhubungan 22. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 24. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 25. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 26. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan 27. Dinas Peternakan dan Perikanan 28. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 29. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 30. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 31. Badan Kepegawaian Daerah 32. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sekretaris pada Dinas Perhubungan Sekretaris pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sekretaris pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sekretaris pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sekretaris pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Sekretaris pada Dinas Peternakan dan Perikanan Sekretaris pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sekretaris pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sekretaris pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sekretaris pada Badan Kepegawaian Daerah Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 34. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 35. Inspektorat 36. Kecamatan Magetan 37. Kecamatan Ngariboyo 38. Kecamatan Panekan 39. Kecamatan Plaosan 40. Kecamatan Sidorejo 41. Kecamatan Poncol 42. Kecamatan Parang 43. Kecamatan Maospati 44. Kecamatan Barat 45. Kecamatan Kartoharjo 46. Kecamatan Karangrejo 47. Kecamatan Karas 48. Kecamatan Sukomoro 49. Kecamatan Kawedanan 50. Kecamatan Takeran	Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Sekretaris pada Inspektorat Sekretaris pada Kecamatan Magetan Sekretaris pada Kecamatan Ngariboyo Sekretaris pada Kecamatan Panekan Sekretaris pada Kecamatan Plaosan Sekretaris pada Kecamatan Sidorejo Sekretaris pada Kecamatan Poncol Sekretaris pada Kecamatan Parang Sekretaris pada Kecamatan Maospati Sekretaris pada Kecamatan Barat Sekretaris pada Kecamatan Kartoharjo Sekretaris pada Kecamatan Karangrejo Sekretaris pada Kecamatan Karas Sekretaris pada Kecamatan Sukomoro Sekretaris pada Kecamatan Kawedanan Sekretaris pada Kecamatan Takeran	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
III	51. Kecamatan Nguntoronadi	Takeran Sekretaris pada Kecamatan Nguntoronadi	
	52. Kecamatan Bendo	Sekretaris pada Kecamatan Bendo	
	53. Kecamatan Lembeyan	Sekretaris pada Kecamatan Lembeyan	
	Admin Unit Penyelenggara Pelayanan		
	1. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	1(satu) Orang Analis Pemerintahan Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Yudha Indra Manggala, S.AP
	2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	1(satu) Orang Pengadministrasian Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Narimah Woro Agustin
	3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah	2(dua) Orang Pejabat Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	1) Pebi Anggraini, S.H. 2) M.Nur Ahsin, S.H.
	4. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	1(satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Ridha Widyastuti
	5. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	1(satu) Orang Analis Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Erfan Ari Wibowo, S.E.
	6. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	1(satu) Orang Analis Teknologi Informasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Dennis Putra Kuswanda, A.Md
7. Bagian Umum Sekretariat Daerah	1(satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Bagian Umum Sekretariat Daerah	Sundari	
8. Bagian Protokol dan	1(satu) Orang Pranata Humas	Gutomo, A.Md	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	
9.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	1(satu) Orang PPBJ Madya pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Iskandar Hadi Subargo, S.T.
10.	Sekretariat DPRD	1(satu) Orang Pranata Humas pada Sekretariat DPRD	Wahyu Mundari
11.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1(satu) Orang Pranata Laporan Keuangan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Adhadi Ismail, S.AB
12.	Dinas Kesehatan	1(satu) Orang Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Kesehatan	Irkham Tri W, A.Md
13.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1(satu) Orang Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Idham Kholid, A.Md
14.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1(satu) Orang Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nanda Ade Handaya
15.	Dinas Sosial	1(satu) Orang Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Sosial	Cahyo Yudha Saputra, A.Md
16.	Dinas Tenaga Kerja	1(satu) Orang Analis Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja	Wahyu Sakti Tri Atmojo, S.Psi
17.	Dinas Lingkungan Hidup	1(satu) Orang Penyuluh Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup	Sa'adah Arum A, S.T.
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1(satu) Orang Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bagus Hendro Kusumo, A.Md

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1(satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Egananda Septian N, S.AB
	20. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	21. Dinas Perhubungan	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan	
	22. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1(satu) Orang Analis Tata Usaha pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Heri Sulistyono, S.Sos
	23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	24. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1(satu) Orang Pengawas Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Retno Wahyuni, SI. Pust
	25. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1(satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Eko Prasetyo, A.Md
	26. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	27. Dinas Peternakan dan Perikanan	1(satu) Orang Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Peternakan dan Perikanan	Adiek Anggadita Wahyu N
	28. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1(satu) Orang Penelaah Pengembangan Usaha pada	Agus Hariyanto, S.E.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	29. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1(satu) Orang Pranata Komputer Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Andi Yudha Nurzaman, A.Md
	30. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1(satu) Orang Analis Rencana Program pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Fungki Prastyana, S.AB
	31. Badan Kepegawaian Daerah	1(satu) Orang Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian Daerah	Depi Krisdianto, S.E.
	32. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1(satu) Orang Anggota Pusdalops pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nino Pratikta, S.Ikom
	33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1(satu) Orang Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Budi Yudiarto
	34. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1(satu) Orang Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Nanda Putra Nurprimastya, S.H.
	35. Inspektorat	1(satu) Orang Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat	Januar Erfan Baikhuni
	36. Kecamatan Magetan	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Magetan	
	37. Kecamatan Ngariboyo	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	38. Kecamatan Panekan	Ngariboyo Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Panekan	
	39. Kecamatan Plaosan	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Plaosan	
	40. Kecamatan Sidorejo	1(satu) Orang Pengadministrasian Tata Pemerintahan pada Kecamatan Sidorejo	Candra Eko Saputro
	41. Kecamatan Poncol	1(satu) Orang Pengelola Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Poncol	Irvan Setyawan, A.Md
	42. Kecamatan Parang	1(satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Parang	Marsiyah
	43. Kecamatan Maospati	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Maospati	
	44. Kecamatan Barat	1(satu) Orang Pengelola PMD pada Kecamatan Barat	Parmidi
	45. Kecamatan Kartoharjo	1(satu) Orang Pengadiministrasian Umum pada Kecamatan Kartoharjo	Mega Hardiantoro
	46. Kecamatan Karangrejo	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Karangrejo	
	47. Kecamatan Karas	1(satu) Orang Pengadiministrasian Umum pada Kecamatan Karas	Subono
	48. Kecamatan Sukomoro	1(satu) Orang Pengadiministrasian Umum pada Kecamatan Sukomoro	Dewi Wahyuni
	49. Kecamatan Kawedanan	Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Kawedanan	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	50. Kecamatan Takeran	1(satu) Orang Pengadiministrasi Perencanaan dan Program pada Kecamatan Takeran	Warsito
	51. Kecamatan Nguntoronadi	1(satu) Orang Pengelola Kepegawaian pada Kecamatan Nguntoronadi	Ika Ardiantari, S.Sos
	52. Kecamatan Bendo	1(satu) Orang Pengelola Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Bendo	Dinaningrum, A.Md.M
	53. Kecamatan Lembeyan	1(satu) Orang Pengelola Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Lembeyan	Ambar Martha Dira, A.Md

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



*Jaka*

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004